

## IKHTISAR

**Muhammad Ali.** *Penerapan Syari'at Islam dalam Perspektif DPW PPP Jawa Barat dan DPW PKB Jawa Barat.*

Penerapan syari'at Islam yang ada di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu, penerapan syari'at Islam melalui jalur struktural, yaitu dengan melegalkan syari'at Islam melalui sidang-sidang MPR dan jalur kultural yaitu penerapan syari'at Islam tidak perlu dengan memformalkan hukum-hukum yang bernuansa Islam karena warga Indonesia telah lama melakukan perbuatan yang sesuai dengan syari'at Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan mereka dalam mengungkapkan argumennya tentang penerapan syari'at Islam khususnya di Jawa Barat, serta bentuk-bentuk syari'at Islam yang sesuai dengan kultur Jawa Barat.

Perdebatan tentang penerapan syari'at Islam di era reformasi ini berawal dari organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan partai politik yang berasaskan Islam untuk mengembalikan Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945, karena menurut pandangan mereka, hukum di Indonesia sampai sekarang tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia, baik itu persoalan hukum, politik, dan ekonomi. Jika syari'at Islam ditegakkan di Indonesia, menurutnya, negeri ini akan adil, makmur dan sejahtera.

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi. Hal ini dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh, sehingga data tersebut terdiskripsikan secara menyeluruh.

Data yang diperoleh dari DPW PPP dan DPW PKB Jawa Barat menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan tentang penerapan syari'at Islam. Persamaannya adalah dalam menerapkan syari'at Islam khususnya di Jawa Barat yang mayoritas penduduknya Islam haruslah dilandasi oleh jiwa kekeluargaan, toleransi dan gotong royong. Sedangkan perbedaannya, terletak dalam pemahaman tentang formalisasi syari'at Islam, bentuk negara, antara HAM dan penegakkan syari'at Islam, dan sumber hukum tertinggi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan syari'at Islam di Jawa Barat yang dilakukan oleh DPW PPP Jawa Barat adalah 'jargon politik' untuk menarik massa sebanyak-banyaknya, dengan tidak bisa memberikan solusi yang lain selain itu (mempertahankan Piagam Jakarta). Sedangkan, yang dilakukan oleh DPW PKB Jawa Barat adalah hanya sebagai pembendung dari keinginan partai Islam seperti yang dilakukan oleh DPW PPP Jawa Barat.